

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Runtuhnya rezim Orde Baru membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Lahirnya pemikiran untuk melakukan suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi memberikan harapan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya ditandai dengan liberalisasi politik di tingkat nasional dan tingkat lokal. Artinya, sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari sistem politik *non*-demokratis menjadi sistem politik yang demokratis.

Namun perubahan sistem politik ini tidak serta merta mengakhiri kekuatan politik lama yang lahir dan berkembang pada masa Orde Baru tersebut. Sistem ini membuat seseorang menjadi termotivasi untuk menjadi salah satu pejabat tertinggi dalam suatu daerah dan bisa mengatur segala urusan di dalam daerah yang di bawahinya. Dalam hal ini tidak jarang partai politik menjadi peran utama untuk mencapai tujuan seseorang. Partai politik merupakan sebuah komponen penting dari sistem politik modern, yang berlandaskan perwakilan politik.¹

Dalam hal ini, negara modern tidak memungkinkan lagi menerapkan demokrasi langsung, karena disebabkan oleh wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun diferensiasi sosial dari warga negara, yang memerlukan lembaga dan struktur sosial politik serta dapat memungkinkan warga negaranya

¹ Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 89.

sebagai pemilik negara yang sesungguhnya berpartisipasi dalam proses politik untuk menentukan bentuk dan arah kebijakan bersama.²

Keberadaan partai politik di Indonesia telah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda yang mencanangkan politik etis pada tahun 1908. Dengan adanya Politik Etis ini, maka banyak kalangan cerdas pandai kaum Bumiputera yang mulai tergerak untuk ikut serta dalam kehidupan ketatanegaraan melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Pelopor utama dari organisasi ke masyarakat tersebut adalah Boedi Oetomo. Dinamika sistem ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia turut merubah tatanan partai politik di tanah air. Seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 maka telah diundangkan berbagai produk perundang-undangan yang mengakomodasi dan mengatur berbagai aspek mengenai partai politik. Hal ini menyebabkan bermunculannya partai politik dengan berbagai ideologi yang mengusung dan memperjuangkan visi dan misinya masing-masing.³

Sejak berdirinya partai politik, pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Selama perkembangannya, partai politik dan sistem pemilu sudah terus mengalami perbaikan tahun demi tahun. Runtuhnya rezim Orde Baru yang digantikan dengan zaman reformasi merupakan langkah awal bagi warga negara Indonesia untuk terus aktif berpartisipasi dalam rangka proses demokratisasi ke arah yang lebih baik.

Namun, pergeseran kekuasaan dari sentralistik ke desentralisasi tidak otomatis meningkatkan sistem politik di Indonesia ke arah yang lebih demokratis.

²*Ibid.*, hlm. 90.

³ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 422.

Seringkali desentralisasi menjadi kontraproduktif bagi proses demokratisasi. Hal ini dikarenakan dengan adanya desentralisasi memunculkan para mafia di pemerintahan lokal yang mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat dengan cara menguasai sumber-sumber daya yang terdapat di daerah. Pasca otonomi daerah banyaknya daerah-daerah yang memiliki elit-elit lokal yang berkembang dengan cara memanfaatkan kekuasaannya, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial.⁴

Sebagai dampak dari tumbuhnya “politik baru” pasca otonomi daerah dan perubahan lanskap politik di level lokal, maka menghasilkan elit-elit informal yang menjamur menjadi elit formal politik.⁵ Otonomi daerah, *redistricting*, dan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) adalah sebagai arena munculnya para elit lokal tersebut. Para elit informal tersebut berebut untuk menjadi elit politik formal karena memiliki posisi istimewa untuk terus dapat menguasai sumber-sumber kekuasaan politik dengan menggunakan dukungan-dukungan dari klien, kroni, maupun relasi-relasi bisnis mereka (bos-bos ekonomi).⁶ Efeknya sangat nyata dari hasil dinasti politik tersebut, sehingga menyulut *ungovern ability* yang akut (tidak berfungsinya tata pemerintahan secara efektif dan efisien), perampasan keuangan daerah, dan relasi kekuasaan politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasannya.⁷

Salah satu contoh dari fenomena tersebut adalah Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Keberhasilan penguasaan politik dinasti yang dilakukan oleh Atut

⁴ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, Bandung: Graha Ilmu, 2007, hlm. 46.

⁵ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik, *Jurnal Ilmu Politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPPI)*, Edisi 21, 2010, hlm. 9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*

dikarenakan banyaknya elit-elit jawara yang mendukung terpilihnya dalam pilkada Banten. Kelompok-kelompok jawara tersebut sangat berpengaruh dalam hal perpolitikan, ekonomi, dan struktur sosial sehingga berhasil menenangkan Atut sebagai salah seorang anak jawara di Provinsi Banten.⁸

Dampak dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah yaitu menghasilkan elit-elit lokal yang berkuasa dengan cara menggunakan simbol-simbol kekuasaannya⁹ untuk memobilisasi dukungan rakyat. Politik lokal di Indonesia era desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah telah berubah menjadi ajang bagi para elit di tingkat lokal untuk menguasai seluruh aspek kehidupan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Kemampuan elit lokal tersebut didukung oleh kekayaan dan kemampuan politiknya untuk melakukan pembelian suara, memanipulasi suara, melakukan tawaran politik (*bargaining position*), dan memobilisasi masyarakat berdasarkan etnis tertentu.¹⁰ Istilah dinasti politik atau politik dinasti menurut pemahaman penulis dimengerti sebagai praktik membangun kekuasaan yang menggurita oleh sejumlah orang yang masih memiliki kaitan kekerabatan.

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang

⁸ Lili Romli, Jawa dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten, *Jurnal Prisma*, Vol. 29 No. 3 Juli 2010.

⁹ Simbol-simbol kekuasaan yang dimaksud adalah keturunan para raja, tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat, keturunan jawara, keturunan asli pribumi, dll.

¹⁰ Sumartono Karim, *Kelompok Elite Dalam Implementasi Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 2010, hlm. 63.

kekuasaan sebelumnya.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, menurut pandangan penulis politik dinasti dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan *concern* yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dalam bentuk yang halus, peneliti berasumsi bahwa politik dinasti muncul dalam gejala "dinasti politik" yang mendorong sanak keluarga maupun elit-elit lama untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan "secara demokratis" oleh para pendahulu mereka.

Praktek dinasti politik secara prosedural demokrasi memang tidak ada yang melanggar, karena semua tahapan demokrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal. Namun, menurut hemat penulis bila melihat secara esensial, maka praktek demokrasi yang dilakukan oleh rezim dinasti politik dalam mendapatkan kekuasaan tersebut ternyata tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Menurut penulis, dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya dinasti politik yang dilakukan oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang yaitu: banyaknya *money politics*, mobilisasi birokrasi, kampanye terselubung, dan beberapa praktek lainnya yang memang melemahkan esensi dari demokrasi itu sendiri.

Terdapat beberapa alasan menurut penulis mengapa politik dinasti tidak dapat diterima. Pertama, adalah demokrasi, dan kata politik sebagaimana ditulis

¹¹ Wasisto Raharjo Djati, 2013, Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Juli 2013: 203-231.

konstitusi kita pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, yakni "polis" atau kemaslahatan umum atau kepentingan orang banyak atau publik.¹² Artinya, politik dalam paham ketatanegaraan kita secara prinsip harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak. Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi (*private interest*).¹³

Kedua, konsep demokrasi yang peneliti terima secara prinsipil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya, sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan "yang umum" atau "yang publik". Prinsip ini tidak dapat ditelikung dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya *patronase* yang masih kuat.¹⁴ Ketiga, dalam konteks Indonesia, invasi kepentingan pribadi (*private interest*) ini sudah mencapai tahap kegilaan tertentu. Ini terlihat dalam gejala di mana makin banyak anak, isteri bahkan ada isteri pertama dan isteri kedua, artis-artis yang hanya mengandalkan bombastisme media bertarung dalam pilkada-pilkada. Kegilaan ini secara sepintas barangkali sama sekali tidak mencederai prosedur demokrasi kita, tetapi secara prinsip merusak substansi politik dan demokrasi yang mengedepankan kemaslahatan dan akal budi umum.

Kasus dinasti politik ini juga terjadi di Provinsi Jambi, dimana pada masa era desentralisasi sosok Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Provinsi Jambi mampu menguasai seluruh aspek kehidupan politik yang ada.¹⁵ Zulkifli Nurdin yang

¹² Hamdi Muluk, *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 78-80.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Melvin Perjuangan Hutabarat, Fenomena "Orang Kuat Lokal" Di Indonesia Era Desentralisasi: Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi, *Tesis*, Jakarta: Fakultas Ilmu

berhasil menang tanpa pengalaman politik sebelumnya telah memiliki jaringan-jaringan maksimal dengan memanfaatkan jaringan-jaringan sosial etnis di Provinsi Jambi sehingga dapat memperoleh kemenangan mutlak dengan suara 75%. Berawal dari kekuasaannya sebagai Gubernur inilah maka Zulkifli Nurdin memanfaatkan semua jaringan untuk terus meningkatkan kekuasaan politiknya di Provinsi Jambi dengan cara menguasai parlemen, etnis-etnis, pengusaha-pengusaha, dan tokoh-tokoh politik di berbagai partai.

Usahnya tersebut ternyata membuahkan hasil, terbukti dengan terpilihnya kembali Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur untuk periode 2005-2010 dengan total kemenangan mutlak 85% total suara.¹⁶ Kekuasaan politik Zulkifli Nurdin berakhir pada tahun 2010, namun meski berhenti dari Gubernur bukan berarti akhir dari kekuasaan politik Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin kemudian memulai dinasti politiknya dengan didukung oleh kekuatan-kekuatan politik lokal potensial di Provinsi Jambi yang berhasil mengantarkan istrinya Ratu Munawaroh Zulkifli menjadi anggota terpilih DPR RI hasil pemilu 2009 dengan total suara 157.819, Zumi Zola Zulkifli menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2010-2015, Hazrin Nurdin adiknya menjadi Ketua DPW Partai PAN Provinsi Jambi, dan keponakannya Sum Indra berhasil menjadi Wakil Walikota Jambi, dan ajudan kepercayaannya yakni Katamso berhasil menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkat jaringan kekuasaan politik Zulkifli Nurdin.¹⁷

Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012, hlm. 6.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dinasti Kekuasaan Politik Jambi, <http://www.jambiekspres.co.id>, diakses tanggal 20 Oktober 2014.

Hal yang menarik dari pengaruh kekuasaan politik Zulkifli Nurdin ini adalah kemenangan Katamso dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Katamso merupakan ajudan kepercayaan Zulkifli Nurdin sejak tahun 1999 dan merupakan putra asli daerah Merlung dan semenjak menjadi ajudan dari Zulkifli Nurdin, dia berhasil menduduki jabatan-jabatan struktural dalam pemerintahan daerah Provinsi Jambi.

Sebelum tahun 1999, Katamso merupakan instruktur bahasa Inggris modern di PEC *Centre* Jambi (1995 – 1998).¹⁸ Kemudian dia diangkat oleh Zulkifli Nurdin untuk bergabung dalam tim pemenangan Zulkfli di tahun 1999. Selain itu, Katamso juga diberikan pekerjaan selain sebagai orang kepercayaan dari Zulkifli Nurdin di PT. Bukit Kausar yang merupakan perusahaan ekspor tepung dan mentega dari keluarga Zulkifli Nurdin.

Pada tahun 2000 Katamso diangkat oleh Zulkifli Nurdin dan menjadi pegawai TKK (Tanda Kecakapan Khusus) di rumah dinas Gubernur Provinsi Jambi, sebagai penterjemah bahasa Inggris, sehingga kemudian menjadi PNS pada akhir Desember tahun 2000.¹⁹ Setelah itu pada tahun 2005, Katamso diberikan posisi di struktural pemerintahan Provinsi Jambi sebagai Kasubbid (Kepala Sub bidang) Perencanaan BAPEMPRODA (Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah) Provinsi Jambi (2005 – 2006), Kasubbag (Kepala Subbagian) Tata Usaha Pimpinan dan Biro Humas, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi (2007 – 2010).

¹⁸ Portal Berita Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diakses melalui: <http://tanjabarkab.go.id/site/biodata-wakil-bupati/>, pada tanggal 1 April 2015, pukul: 18:30 WIB.

¹⁹ Diakses melalui Media Tanjung Jabung Barat., <http://mediacentertanjabar.blogspot.com/2011/09/katamso-sa-se-me-guru-les-bahasa.html>, 8 April 2015, pukul: 22:12 WIB.

Setelah periode kepemimpinan Zulkifli Nurdin berakhir pada tahun 2010, Katamso tidak mendapatkan Jabatan Pada era Kepemimpinan Gubernur Hasan Basri Agus yang merupakan rival dari Zulkifli Nurdin. Setelah berakhir masa kepemimpinan Zulkifli, ternyata sosok Zulkifli masih memiliki kekuatan politik yang besar sehingga berhasil membantu meningkatkan perolehan suara bagi pasangan Usman Ermulan - Katamso yang berhasil terpilih sebagai Wakil Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat 2011 – 2016.²⁰

B. Rumusan Masalah

Sebagian politik dinasti tampak pada suksesi langsung. Suami, istri, anak, ayah, kakak, saudara ipar diajukan menggantikan kepala daerah sebelumnya. Namun, banyak pula suksesi tidak langsung di daerah itu juga, tetapi di daerah lain dalam satu provinsi. Politik kekerabatan ini menunjukkan akar feodalisme dan tradisi monarki di Indonesia belum sepenuhnya berubah. Bukan meritokrasi yang melandasi pilkada, melainkan nepotisme dan kolusi yang berusaha dirobohkan dalam Reformasi 1998.

Jabatan sebagai Gubernur Jambi digunakan oleh Zulkifli Nurdin untuk kembali memperkuat jaringan-jaringan kekuasaan politiknya di Provinsi Jambi dengan melanggengkan ajudan terbaiknya menjadi Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pengaruh kekuatan politik Zulkifli Nurdin mampu memperkuat kekuatan Katamso sebagai kandidat putra daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

²⁰ Portal Berita Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diakses melalui: <http://tanjabbarkab.go.id/site/biodata-wakil-bupati/>, pada tanggal 1 April 2015, pukul: 18:30 WIB.

Katamso mampu mengalahkan pasangan *incumbent* yang juga maju sebagai calon Bupati yaitu Syafrial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.²¹ Katamso yang awalnya hanya merupakan ajudan pribadi kemudian setelah berhasil menjadi PNS pada tahun 2000 karirnya di lingkungan pemerintahan semasa Gubernur Zulkifli Nurdin semakin cemerlang. Ditandai dengan diberikannya jabatan-jabatan struktural di pemerintahan.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat dukungan politik Zulkifli Nurdin kepada pasangan Usman Ermulan – Katamso dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan dukungan politik Zulkifli Nurdin kepada pasangan Usman Ermulan – Katamso dalam Pemilihan Kepala Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2011.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua manfaat, yaitu secara akademis dan secara praktis. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang studi elit politik di tingkat lokal melalui pemahaman dinamika dinasti politik kekuasaannya dan secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi berguna bagi kalangan akademisi dan masyarakat secara umum dalam memahami fenomena dinasti politik di tingkat lokal.

²¹ <https://www.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 9 April 2015 pukul: 09:10 WIB.